

**PELAKSANAAN *INFORMED CONCENT* TINDAKAN PERSALINAN
OLEH BIDAN DESA DI KABUPATEN BLORA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh
Cipto
NIM 09.93.0056

Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2012



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 238/S2/MHK/C,

TGL : 8/6 '12

PARAF : *uf*

TESIS
PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* TINDAKAN PERSALINAN
OLEH BIDAN DESA DI KABUPATEN BLORA


Diajukan Oleh

CIPTO

NIM.09.93.0056

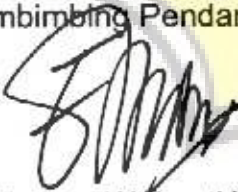
Telah disetujui oleh

Pembimbing Utama


Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN

tanggal,

Pembimbing Pendamping


Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

tanggal,

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : CIPTO

Nim : 09.93.0056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Rabu., 14 Maret 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN

2. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

3. dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)

(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Rabu., 14 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)
**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini, dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat Sarjana Strata Dua, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* TINDAKAN PERSALINAN OLEH BIDAN DESA DI KABUPATEN BLORA", dimana dalam penelitian diharapkan mendapatkan gambaran tentang dasar hukum informed consent tindakan persalinan, pelaksanaan informed consent tindakan persalinan oleh bidan desa di Kabupaten Blora, dan hambatan hambatan dalam pelaksanaan serta cara/usaha yang dilakukan bidan desa untuk mengatasinya.

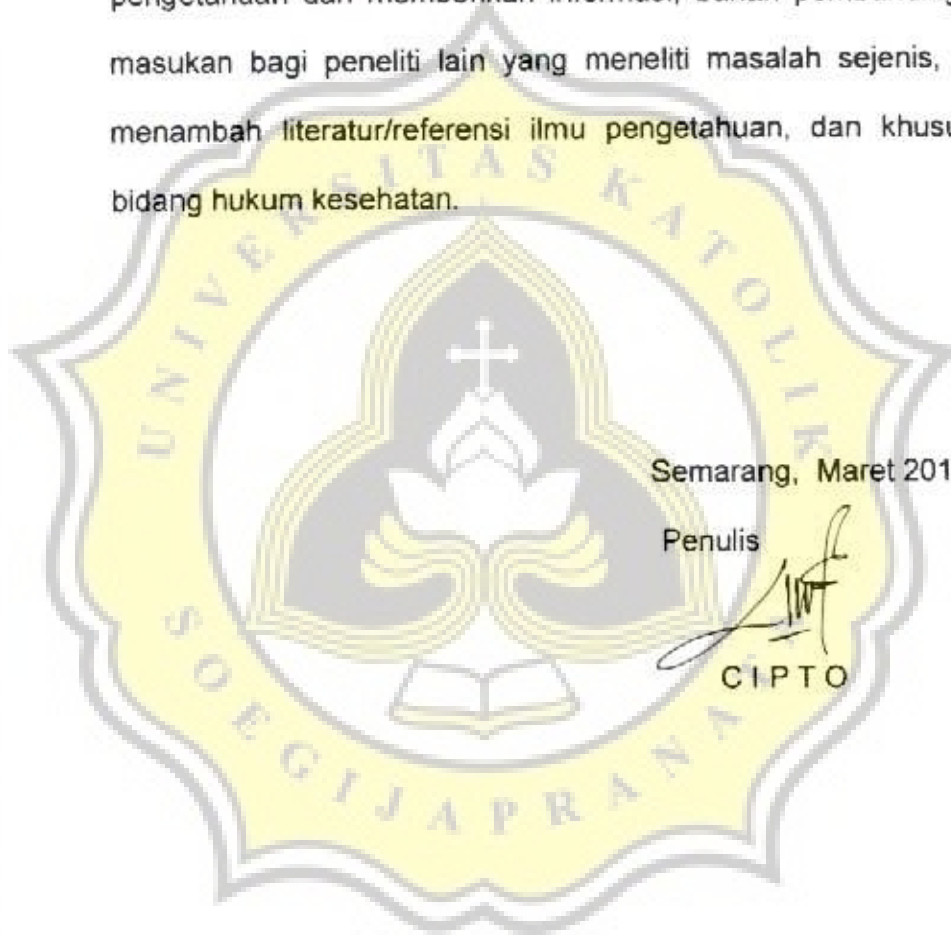
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran serta masukan-masukan yang sangat berharga dan bermanfaat demi kesempurnaan tesis ini dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang tak terhingga nilainya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing utama, yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat, serta bantuan atas kesabarannya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, dan dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. dr. Sofwan Dahlan, SpF(K), selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu

pengetahuan dalam segala aspek, khususnya aspek hukum kesehatan

7. Para staf sekretariat Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan XII tahun 2010, atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka, pengalaman, pengetahuan, serta kerjasama yang kompak selama menempuh pendidikan pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
9. Istri dan anak-anak tercinta, yang telah membarikan doa, dukungan, dorongan semangat dalam mengambil dan menyelesaikan studi pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
10. Ayah dan Ibu tercinta yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dorongan semangat serta dukungannya yang tak ternilai harganya, sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.
11. Semua keluarga, rekan-rekan kerja di Poltekkes Kemenkes Semarang, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karena keterbatasan dan kekurangan dari penulis sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan yang bersifat membangun menuju kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan memberikan informasi, bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis, serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan, dan khususnya bidang hukum kesehatan.



Semarang, Maret 2012

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CIPTO', is written over the printed name.

CIPTO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran	xi
Halaman Pernyataan	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Penyajian Tesis	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelayanan Kesehatan dan Asuhan Persalinan	
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	19
2. Pengertian Asuhan Persalinan.....	20
3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam asuhan persalinan.....	22
B. Ketentuan Hukum dalam Pelaksanaan Informed Consent	
1. Pengertian Informed Consent	23
2. Bentuk Informed Consent	24
3. Isi dari Informed Consent.....	27

4. Yang berhak menandatangani Informed Consent	28
5. Tujuan Informed Consent.....	28
6. Pelaksanaan Informed Consent dalam Kegawatdaruratan.....	29
C. BidanDesa	
1. Pengertian Bidan dan Bidan Desa	31
2. Wewenang Bidan Praktek Mandiri.....	33
3. Wewenang bidan yang menjalankan program pemerintah.....	36
4. WewenangBidanDesa	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tenaga Bidandan Tindakan Persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora	
1. Gambaran umum tenaga bidan di Kabupaten Blora	39
2. Gambaran pelayanan kesehatan di Poliklinik Kesehatan Desa.	39
B. Pelaksanaan dan Prosedur Informed Consent Tindakan Persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Blora.	
a). Hasil Penelitian	43
b). Pembahasan.....	64
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	84
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hasil tabulasi studi dokumentasi informed consent persalinan.

Tabel 2: Hasil tabulasi tentang bentuk informed consent persalinan

Tabel 3: Hasil tabulasi tentang isi informed consent persalinan

Tabel 4: Hasil tabulasi wawancara pasien tentang pelaksanaan informed consent persalinan

Tabel 5: Hasil tabulasi tentang hambatan dalam pelaksanaan informed consent persalinan.

Tabel 6 : Hasil tabulasi latar belakang tingkat pendidikan ibu bersalin.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil wawancara pada 20 bidan desa tentang bentuk informed consent yang dilaksanakan.

Lampiran 2: Hasil studi dokumentasi arsip informed consent tindakan persalinan.

Lampiran 3 : Hasil wawancara isi dari informed consent dalam tindakan persalinan.

Lampiran 4 : Hasil studi dokumentasi isi dalam informed consent tindakan persalinan.

Lampiran 5 : Hasil wawancara pada pasien tentang pelaksanaan informed consent tindakan persalinan

Lampiran 6: Hasil wawancara pada bidan desa tentang hambatan dalam pelaksanaan informed tindakan persalinan

Lampiran 7 : Kuesioner penelitian tentang latar belakang tingkat pendidikan pasien.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Cipto, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0056

Menyatakan :

1. Bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2012



CIPTO

ABSTRACT

Health Development is expected to be conducted by all nations to achieve the degree of health community. The health care services consist of health promotion, prevention, curation and rehabilitation. To give a health care services should be conducted in accordance with the standart operating procedures and regulations, such as the implementaion of informed concent . One of the health care services is a procedure of labor given by a midwife. Because of labor is a part of medical procedure which has a high risk, so that the procedure of delivering baby have to be conducted a properly informed concent procedure.

The research methode used in this study was the Yuridical Sociology with a descriptive analization to get the description of the implemntation of informed concent during the procedure of labor given by midwives who work in the villages in Blora District. The sample of this study included 20 midwives who work in the villages and 20 post partum patients. To get the data used a questionnaire developed by researcher based on "The Health Ministry no. 290 in 2008 about an Agreement of Medical Procedure". Besides that the interview and study documentation were applied in this study.

The result showed that the implentation of informed consent on the procedure of labor was conducted properly. However, there were several barriers during its implementation for example a limited understanding of the importance of informed consent among midwives who work in the villages, less of supervising from a Health District Department and a low level of patients' education and knowledge regarding the necessary of informed consent.

Keywords: Informed consent, procedure of labor, midwives who work in the villages

ABSTRAK

Pembangunan kesehatan diharapkan dapat diselenggarakan oleh semua bangsa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, curative dan rehabilitatif. Dalam pemberian pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan standart prosedur dan aturan yang di tetapkan, diantaranya pelaksanaan inform consent. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan adalah tindakan persalinan oleh bidan desa. Sedangkan tindakan persalinan merupakan bagian dari tindakan kedokteran yang beresiko tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya harus melaksanakan informed consent dengan benar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "yuridis sosiologis dengan descriptive analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan informed consent pada tindakan persalinan oleh bidan desa di Blora. Responden yang digunakan sebanyak 20 bidan desa dan 20 pasien pasca bersalin. Untuk pengambilan data dengan menggunakan kuesioner yang peneliti susun berdasarkan Permenkes no 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Disamping itu data juga diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent pada tindakan persalinan sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya kurangnya pemahaman bidan desa tentang pentingnya informed consent, kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien terhadap manfaat informed consent.

Kata kunci : informed consent, tindakan persalinan, bidan desa